Perlindungan Hukum bagi Investor Saat Covid-19 pada Perseroan Terbatas yang Pailit

Bunga Sahila Hizbul Istiqomah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email : bngashlahzblistqmh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor yang perseroan terbatas nya pailit saat pandemi covid-19. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dengan menggunakan sumber data yaitu buku-buku literatur dan peraturan undang -undang yang berlaku. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data yang kemudian diolah menjadi sebuah hasil penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa investor menjadi kreditur konkuren dalam mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan hak nya pada saat perseroan terbatas pailit saat pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap investor yang perseroan terbatas nya pailit saat pandemi covid-19 masih kurang dan belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi investor. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh PT yang bersangkutan dan dapat juga mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas apabila terdapat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil terhadap pemegang saham

Kata Kunci: Investor, Perseroan Terbatas, Covid-19, Perlindungan, Pailit

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. menurut Hansen. L. S. (2021) Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk Usaha Perseroan Tebatas. Kelebihan tersebut terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris serta tanggung jawabnya terhadap pemegang saham dan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keberadaan RUPS sebagai organ tertinggi yang mempunyai wewenang tertentu dan kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS dalam melakukan tindakan tertentu dinilai merupakan bentuk perlindungan yang memadai bagi pemegang saham dan pihak kreditur, dalam hal ini RUPS merupakan organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

Pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini banyak sekali perseroan terbatas (PT) mengalami kegoncangan pada perusahaannya dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat banyak masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap dirumah saja dan menghindari tempat ramai, sehingga hal ini berpengaruh pada kegiatan perseroan terbatas dalam mengembangkan produksinya (Nastiti, G. M., 2021)

Selain dari keberadaan RUPS, salah satu hal lain yang menjadi kelebihan dari sebuah PT dibanding badan usaha lainnya dapat dilihat

dari doctrine of separate legal personality yang pada intinya adalah adanya suatu pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri (Indra dan Ivan, 2008 dalam Hansen L. S., 2021).

Kata “Perseroan” menunjuk modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “Terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya (Khairandy 2007 dalam Hansen L. S., 2021). Pada saat ini, banyak perseroan terbatas (PT) yang mengalami pailit dikarenakan jumlah penurunan konsumsi dari jumlah produksi suatu perseroan.

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily, bankrupt artinya bangkrut, pailit dan bankruptcy artinya kebangkrutan, kepailitan. (Manihuruk, 2016) Sedangkan Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perseroan terbatas, toko, dan sebagainya). (Ginting, 2004)

Menurut UU Kepailitan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. (Hartono, 2016) Kepailitan yang dialami oleh PT tersebut tidak hanya berdampak pada PT sendiri tetapi juga pada karyawan dan pemegang saham (investor) yang berinvestasi di PT tersebut.

Dari latar belakang diatas, rumuskan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor sendiri jika perseroan

terbatas pailit, supaya investor mendapat kejelasan mengenai status dalam mendapatkan pemenuhan haknya atau ganti rugi.

B. Pembahasan

Perseroan Terbatas (PT) yang sudah mendapat putusan pailit dari pengadilan maka hilanglah hak kepengurusan dan penguasaan kekayaan sejak hari diucapkannya pernyataan pailit oleh hakim, segala kepengurusan dan pemberesan harta pailit diberikan kepada kurator yang diangkat pada saat putusan pailit. Pada direksi di PT tersebut dapat melaksanakan kegiatan perusahaan hanya dapat bekerja jika diminta oleh kurator dan sudah tidak lagi memiliki kewenangan mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan. (Nastiti, G. M., 2021)

Maka segala gugatan hukum mengenai hak dan kewajiban harta pailit PT diajukan oleh atau terhadap kurator. Direksi PT dapat dicekal apabila terjadi karena hukum, tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada komisaris dan pemegang saham publik hanya diwajibkan pelaporan saja jika diindikasikan adanya tindakan hukum. Jika PT mengajukan pailit terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini maka tindaklanjutnya menjadi kewenangan dari OJK. (Nastiti, G. M., 2021)

OJK menyebutkan bahwa pemenuhan hak investor dilakukan paling akhir atau dapat disebut investor menjadi kreditur konkuren atau berkedudukan menjadi kreditur konkuren, ketika PT mengajukan pailit dan dinyatakan pailit oleh hakim maka asetnya akan dijual dan investor adalah pihak terakhir yang akan diberikan asetnya. (Nastiti, G. M., 2021)

Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan,
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

Pengaruh pemegang saham dalam suatu organisasi bergantung pada persentase saham yang dimiliki. Pemegang saham yang memiliki lebih dari setengah saham perusahaan mengendalikan perusahaan dan dikenal sebagai pemegang saham mayoritas. Sedangkan pemegang saham yang memiliki kurang dari 50% saham perusahaan dikenal sebagai pemegang saham minoritas dan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap operasi harian perusahaan. Persentase kepemilikan saham mereka juga menentukan hak mereka untuk memberikan suara dalam urusan bisnis dan untuk duduk di dewan direksi. Karena mereka adalah pemilik perusahaan

Pada pandemi COVID-19 seperti saat ini banyak Perseroan Terbatas yang mengeluh hasil produksinya menurun tetapi tetap harus membayar beban

gaji dan beban lainnya sehingga keuangan mereka sangat tidak stabil, dengan ketidak stabilan keuangan PT tersebut PT mengajukan pailit dan harta pailit diurus oleh kurator sehingga nanti asetnya dapat dijual dan dikembalikan pada kreditur sesuai dengan kedudukan krediturnya, apabila investor yang mendapat aset paling terakhir kemungkinan besar ia bisa tidak mendapat kembali asetnya dikarenakan terdapat kreditur yang lebih berkedudukan tinggi untuk mendapat hak jaminannya (Nastiti, G. M., 2021)

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini didasari dari pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia. Jadi dalam hal ini, tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan (laba).

Pengertian tersebut kembali diperkuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya

manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggung-jawaban yang dianut sebuah badan hukum (Kurniawan, 2014)

Karena para pemegang saham minoritas mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas, Beliau menambahkan hak-hak yang sebenarnya dimiliki para investor dalam hal investasi di pasar modal yakni : hak untuk melakukan transaksi jual beli , hak untuk mendapatkan bagi hasil (dividen) dari perusahaan, hak untuk mendapatkan keuntungan margin dari perbedaan nilai transaksi jual beli saham ,hak untuk mendapatkan pembayaran atas pencairan saham di pasar modal, hak untuk mendapatkan pembayaran atas kepailitan perusahaan (Chandra. F & Tampi. M. M., 2020).

Perlindungan hukum terhadap stakeholders terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Hak tersebut antara lain, personal right, appraisal right, enquete recht, dan hak derivatif. Perlindungan hukum atas pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting tidak diatur secara spesifik. Namun, ketentuan perlindungan hukum pemegang saham secara umum merujuk pada UUPT.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting yang timbul akibat dari tidak diterapkannya prinsip pengelolaan perusahaan yang baik: Personal right, yaitu pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menuntut perseroan melalui pengadilan negeri jika tindakan perusahaan dianggap tidak wajar dan tidak adil yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, appraisal right atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham supaya sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya, enquete Recht atau hak angket atau hak pemeriksaan, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan lewat pengadilan negeri, pada keadaan adanya dugaan perseroan, anggota direksi atau jajaran komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak menguntungkan

Prinsip keterbukaan (full Disclosure) memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu: (Putralie et al., 2011)

1. Prinsip ketinggian derajat akurat informasi
2. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi
3. Prinsip equilibrium antara efek negative dan efek positif jika informasi tersebut dibuka karena publik

pemerintah juga mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, yaitu dalam hal: (Putralie et al., 2011)

- 1) Menjamin bahwa investor akan memperoleh informasi yang full disclosure bila ada penawaran umum maka pemerintah mewajibkan emiten untuk mendisclose segala sesuatu yang berhubungan dengan emiten dan emisi

sehingga masyarakat akan mendapat informasi yang utuh mengenai emisi dan emiten yang bersangkutan.

- 2) Menjamin dan meng-enforce prinsip keterbukaan Setiap keputusan untuk melakukan investasi pasti mengandung resiko, semakin besar keuntungan yang dapat diambil maka semakin besar pula resiko yang harus diambil

Dasar hukum prinsip keterbukaan: (Putralie et al., 2011)

a. Pasal 85 UU No.8/1995

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

b. Pasal 86 UU No.8/1995

Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:

- 1) menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- 2) menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambatlambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

c. Pasal 87 UU No.8/1995

- 1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut
- 2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

C. Kesimpulan

Dengan melihat pemenuhan hak atas pembayaran kerugian yang dialami oleh pemegang saham pada PT yang pailit saat pandemi COVID-19 yang terakhir dalam menerimanya karena pemegang saham merupakan kreditur konkuren dan terdapat kreditur preferen yang lebih berhak menerima pemenuhan hak atas pembayaran kerugian yang dialaminya maka sangat tidak adil apabila pemegang saham tidak kunjung mendapatkan pemenuhan haknya dan kekayaan hasil likuidasi tersisa hanya sedikit bahkan bisa minus, pemegang saham dirugikan karena sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sehingga perlindungan hukum investor pada Perseroan Terbatas yang pailit saat pandemi COVID-19 adalah diterapkannya prinsip full and fair disclosure atau transparansi. Prinsip keterbukaan merupakan pengungkapan data perusahaan yang menyeluruh dan lengkap mengenai data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh PT yang bersangkutan dan dapat juga mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas apabila terdapat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil terhadap pemegang saham

Daftar Pustaka

- Chandra, F., & Tampi, M. M. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG SAHAM PADA EMITEN DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS NO. 4/PDT. SUS. PEMBATALAN PERDAMAIAN/2019/PN. NIAGA. JKT. PST JUNCTO NO. 1/PK/PDT. SUS-PAILIT/2020). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 400-424.
- Hansen, L. S. (2021). ARAH BENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN SEBAGAI PERKEMBANGAN PERSEROAN TERBATAS. *SOL JUSTISIO*, 3(1 Juni), 321-327.
- Hartono, D. T. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Kurniawan, M. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(1), 72-86.

MANIHURUK, D. M. N. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA.

Nastiti, G. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Perseroan Terbatas yang Pailit
Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 756-767.

Putralie, E. M., Syahputra, Y. A., & Zul, M. (2011). Perlindungan Hukum Investor Di Pasar
Modal. *JURNAL MERCATORIA*, 4(1), 26-36.

Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7

Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 18

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106